

## **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM HATESPEECH DI MEDIA SOSIAL YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM BANJARMASIN**

Irma Sapitri<sup>1</sup>, Muthia Septarina<sup>2</sup>, Noor Azizah<sup>3</sup>,  
Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-  
Banjari Banjarmasin.NPM19810159  
Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-  
Banjari Banjarmasin. NIDN1118098401  
Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-  
Banjari Banjarmasin. NIDN1105077301  
Email: irmasafitri@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Irma sapitri. NPM. 18.81.0159. 2022. Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Hatespeech di Media Sosial yang terjadi di Wilayah Hukum Banjarmasin. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Muthia Septarina, S.H., M.H Pembimbing II Noor Azizah S.H., M.H.*

*Kata kunci : Ujaran kebencian, Penerapan Hukum*

*Maraknya perbuatan ujaran kebencian (hate speech) semakin mendapat perhatian dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Ujaran kebencian dapat mendorong terjadinya penghasutan, diskriminasi, kekerasan, bahkan perpecahan bangsa. Dan yang menjadi sasarannya adalah masyarakat budaya etnis, ras, dan agama.*

*Dimana yang satu diproses yang satu tidak maka dengan adanya latar belakang tersebut maka penulis menarik dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana penerapan hukum terkait hatespeech dimedia sosial yang terjadi di wilayah hukum Banjarmasin. Bagaimana penyelesaian hukum terkait hatespeech di media sosial yang terjadi di wilayah hukum Banjarmasin.*

*Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Bahan penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara terhadap narasumber, pengamatan langsung dilapangan. dan melalui metode pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal-pasal yang terkait dengan ujaran kebencian Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.*

## ABSTRACT

*Irma Sapitri. NPM. 18.81.0159. 2022. Juridical Review of the Implementation of Hatespeech Law on Social Media which occurs in the Banjarmasin Legal Area. Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Supervisor I Muthia Septarina, S.H., M.H Supervisor II Noor Azizah S.H., M.H.*

*Keywords: Hate speech, Application of law*

*The rise of hate speech is increasingly receiving attention from the public and law enforcement officials. Hate speech can encourage incitement, discrimination, violence, and even national division. And the targets are ethnic, racial and religious cultural communities.*

*Where one is processed and the other is not, with this background the author draws two problem formulations, namely how to apply the law regarding hate speech on social media which occurs in the Banjarmasin jurisdiction. What is the legal resolution regarding hate speech on social media that occurs in the Banjarmasin jurisdiction?*

*This research method uses sociological juridical research. Research material was collected by interviewing sources, direct observation in the field. and through a method of approaching laws and regulations related to this research, namely the Criminal Code with articles related to hate speech, Law no. 11 of 2008*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arief, Barda Nawawi 2022, Kebijakan Kriminal, Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Calhoun, J.F & Acocella, J.R 1990. Psikologi tentang penyesuaian dan hubungan

kemansiaann. Semarang : Semarang Press

Sultan Remy Syahdeini, 2009, kejahatan & tindak pidana komputer, Jakarta Pustaka Utama Grafiti.

Ahmad M. Ramli, 2004 , Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Rafika Aditama.

Muhammad Danuri dan Suharnawi, 2017, “trend cybercrime dan teknologi informasi di Indonesia”Jurnal infokom No.2 Tahun VIII/September.

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta Kencana Prenada Media Group

Sofian Satrawidjaja, 2011 Hukum Pidana I, Amrico Bandung

Suharyanto, Budi, 2013, “Tindak Pidana Teknologi dan Informasi (cybercrime)

Rajagrafindo: Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia

Lembaran Negara 1981/76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara Republik Indonesia

### C. Jurnal/Karya Ilmiah

<https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/SURAT-EDARAN-KAPOLRI-MENGENAI-PENANGANAN-UJARAN-KEBENCIAN.PDF> “Surat Edaran Kapolri.” Kontras.

Terakhir diubah 2018. Diakses  
19 Juli 2022

<http://repository.um-palembang.ac.id>  
Tinjauan Yuridis tentang Ujaran  
kebencian diakses 19 Juli 2022

<http://repository.dharmawangsa.ac.id>  
Pengertian Tinjauan Yuridis di  
akses 19 Juli 2022

Barda Nawawi Arief, Iqbal Kamalludin,  
“Kebencian Formulasi Hukum  
Pidana Tentang  
Penanggulangan Tindak Pidana  
Penyebaran Ujaran Kebencian  
di Dunia Maya” REFORMASI  
HUKUM 15 No.1 Tahun 2019  
Diakses 21 Juli 2022

Rahmawati, Novi. “Implikasi Perubahan  
Undang-Undang Informasi dan  
Transaksi Elektronik terhadap  
Tindak Pidana Ujaran  
Kebencian” Jurnal Mahupiki no  
1 (2017): 1-21 di akses tanggal  
25 juli 2022

Siahaan, Andysah Putera Utama,  
“pelanggaran Cybercrime dan  
Kekuatan Yuridiksi di  
Indonesia” Jurnal Teknik dan  
Informatika 5, no. 1 (2018): 6-9